



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Salam sejahtera untuk kita semua

Segenap masyarakat Kabupaten Brebes yang saya banggakan,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rangkuman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

RLPPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana amanat Pasal 69 ayat (1) juncto Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang dilaksanakan pada tahun 2022, didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, hal tersebut sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 061 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 041 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 042 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022.

GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat dari Provinsi Jawa Tengah pada koordinat antara 6°44' - 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' - 109°11' Bujur Timur, dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantai sepanjang 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil laut dari garis pantai seluas 1.036,80 km².

Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.769,62 km², terdiri dari 17 Kecamatan dan 292 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Bantarkawung adalah Kecamatan terluas dengan luas 208,18 km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kersana sebesar 26,97 km². Wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan sebagian besar terletak di dataran tinggi. Sedangkan wilayah bagian utara terletak di dataran rendah. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 m. (*Kabupaten Brebes Dalam Angka 2022*).

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes jumlah penduduk Kabupaten Brebes tahun 2022 mencapai 2.019.255 jiwa terdiri dari 50,74% penduduk laki-laki atau 1.024.612 jiwa dan 49,26% penduduk perempuan atau 994.643 jiwa.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan pada visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana telah disebarluaskan kepada masyarakat sebagai janji kampanye yang harus dipenuhi selama periode kepemimpinannya. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah :

“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 yang diarahkan untuk lebih difokuskan pada percepatan penyelesaian sasaran dan target pembangunan utamanya pelayanan dasar yang belum tercapai serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan menuju “Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Selain itu, pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2022 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2022 disusun dengan memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga termasuk mengakomodir Pokok-pokok Pikiran DPRD, Pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2022 juga akan memperkuat program/kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi, Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan, Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja, Pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak, Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hingga ditingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah.

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional.

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TA 2021	CAPAIAN KINERJA TA 2022	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,32	67,03	1,071
2	Angka Kemiskinan	17,43	16,05	-7,917
3	Angka Pengangguran	9,78	9,48	-3,067
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,33	5,61	140,773
5	Pendapatan Per kapita	24,57	26,74	8,832
6	Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)	0,368	0,366	-0,543

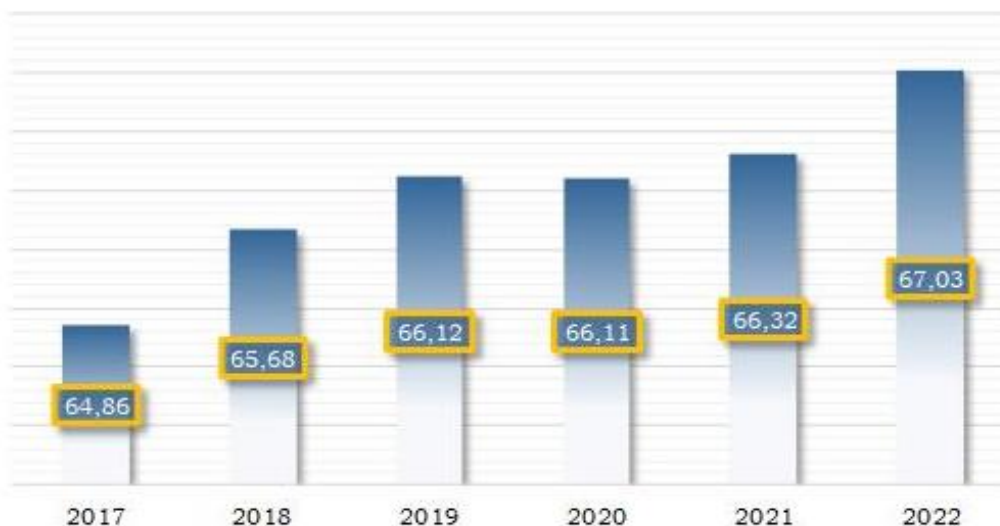
Sumber Data : BPS Kabupaten Brebes

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan formula untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dikenalkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dan dipublikasikan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Perkembangan IPM Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2022 berturut turut 64,86; 65,68; 66,12; 66,11; 66,32 dan 67,03.

Grafik 1
IPM Kabupaten Brebes Tahun 2017-2021

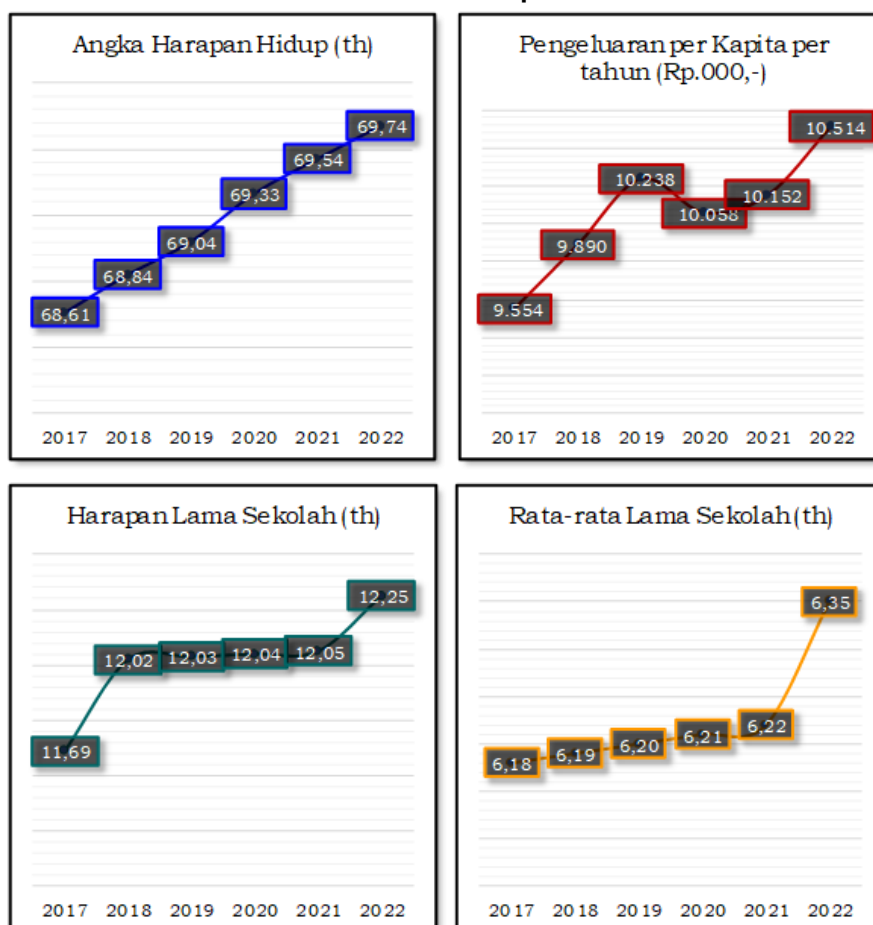


Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2022

Adapun Komponen-komponen dalam IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan *Purchasing Power Parity* (PPP) atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Grafik 2

Angka Harapan Hidup (AHH), Pengeluaran per Kapita per Tahun, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes 2017-2022



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2022

a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara umum khususnya bidang kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat diberikan predikat membaik berdasarkan rataan harapan hidup yang semakin panjang. Dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja di bidang kesehatan serta mengukur kualitas/derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program kegiatan di bidang kesehatan tidak dapat berlangsung tunggal, memerlukan dukungan dari berbagai bidang agar terdapat akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Brebes pada tahun 2017-2022 semakin meningkat, yaitu sebesar 68,61 tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi 69,74 tahun pada tahun 2022.

b) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (tahun) merupakan harapan yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia lebih dari 7 tahun. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan disemua lini yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data BPS, Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat Kabupaten Brebes pada tahun 2017-2022 semakin meningkat, yaitu sebesar 11,69 tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi 12,25 tahun pada tahun 2022.

c) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 keatas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Brebes pada tahun 2017-2022 semakin meningkat, yaitu sebesar 6,18 tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi 6,35 tahun pada tahun 2022.

d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Purchasing Power Parity (PPP) atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu bulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Indikator ini dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

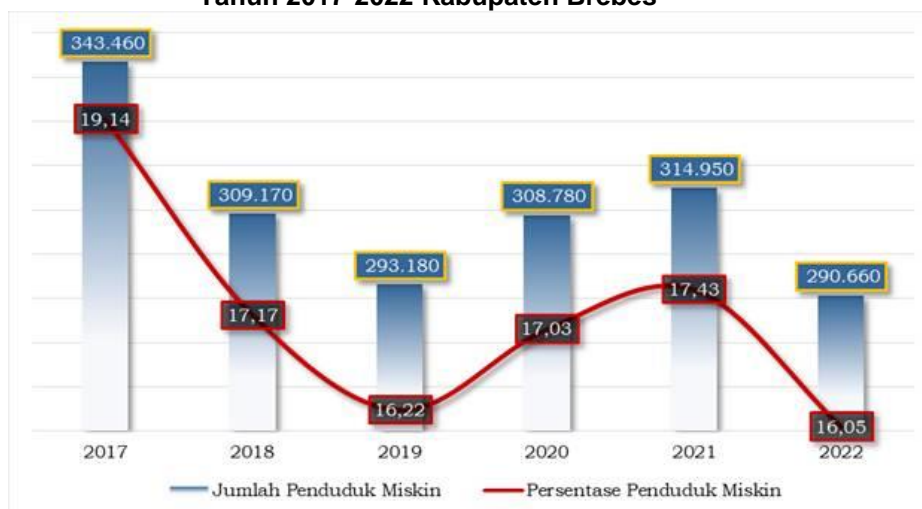
Berdasarkan data BPS, perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Brebes pada tahun 2017-2022 mengalami kenaikan, yang berarti ada peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Brebes, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.9.554.000,- per orang per tahun menjadi sebesar Rp. 10.514.000,- per orang per tahun pada tahun 2022.

B. Angka Kemiskinan

Gambaran kemiskinan ditunjukkan dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan diukur dari Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Data Kemiskinan Makro bersumber BPS per bulan Maret 2022, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2022 adalah sebesar 16,05%, mengalami penurunan sebesar 1,38% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 17,43%, hal ini sebagai dampak program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Brebes.

Grafik 3
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2017-2022 Kabupaten Brebes

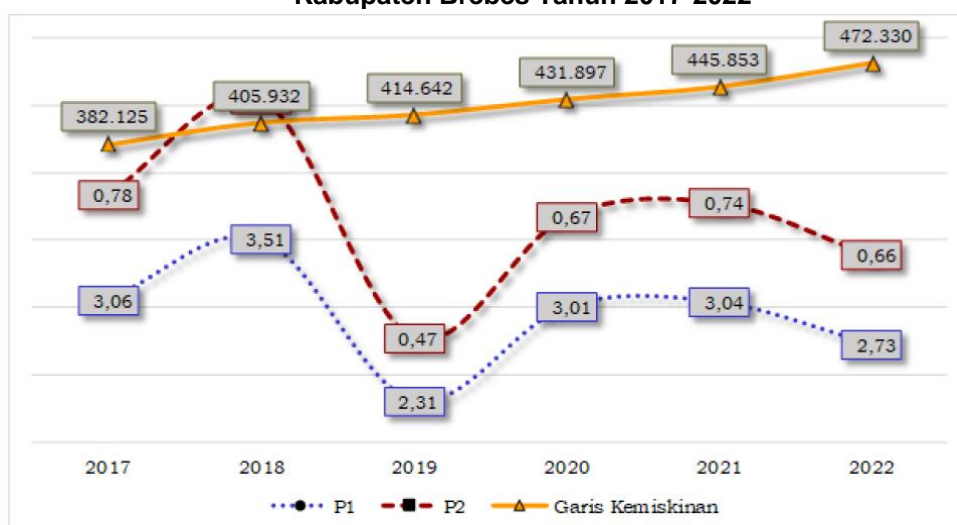


Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2022

Dibandingkan dengan 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah, Kabupaten Brebes menempati posisi ke 33, di atas Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen.

Indikator kemiskinan makro lainnya, yaitu Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Brebes tahun 2022 sebanyak 290.660 jiwa, atau berkurang sebanyak 24.290 jiwa dari jumlah penduduk miskin tahun 2021 yang sebanyak 314.950 jiwa. Garis Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2022 sebesar Rp. 472.330,- per kapita per bulan, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp. 445.853,- per kapita per bulan. Indeks Kedelamaan Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2022 sebesar 2,73 dan di tahun 2021 yang sebesar 3,04. Indeks kedelamaan kemiskinan ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indikator berikutnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2022 sebesar 0,66, dan pada tahun 2021 yang sebesar 0,74.

Grafik 4
Perkembangan Indeks Kedelamaan Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022

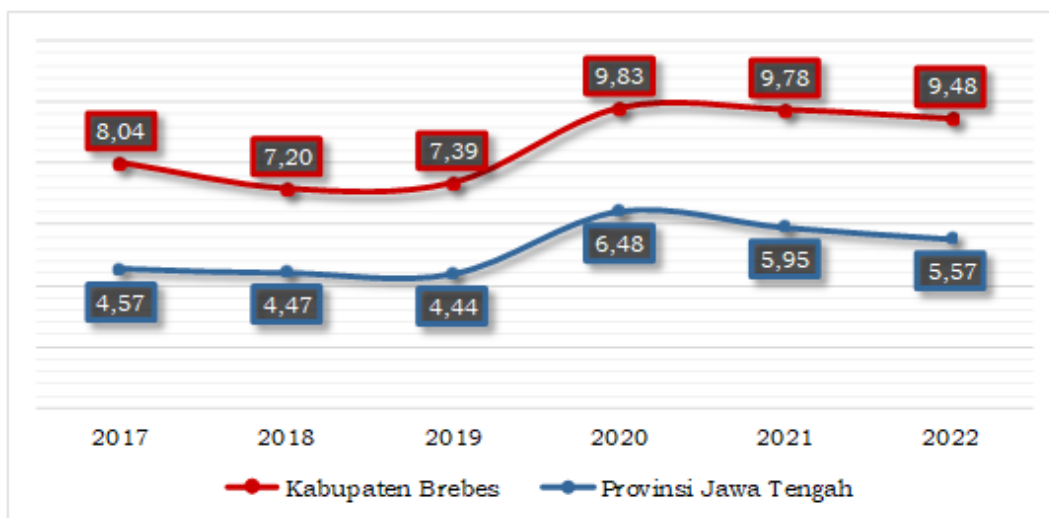


Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2022

C. Angka Pengangguran

Berdasarkan data BPS, Angka Pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 berfluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 8,04%, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 7,20%, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,39%, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 9,83%, pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 9,78% dan pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 9,48%. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Brebes sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang antara lain menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran karena terjadi pengurangan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian akibat lesunya kondisi perekonomian nasional dan global.

Grafik 5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes (%)
Tahun 2017-2022

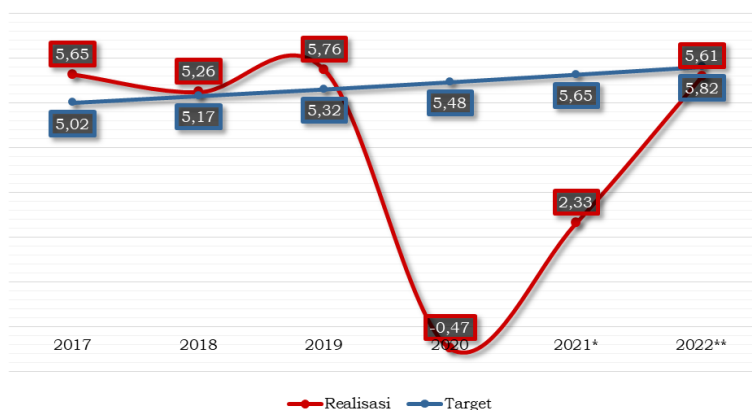


Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2022

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dari tahun 2017 sampai dengan 2022 menunjukkan kondisi yang positif dan fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 5,65 persen, kemudian melambat pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,26 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,76 persen, dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi (laju pertumbuhan ekonomi negatif) sebesar 0,47% akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian secara regional, nasional dan global, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 2,33%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,61%, dan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Adapun, jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2022 masih lebih baik, pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi sebesar 5,31%, hal ini disebabkan karena kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Brebes yang relatif stabil dalam kondisi pandemi COVID-19. Secara lengkap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut ini:

Grafik 6
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes
Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2022

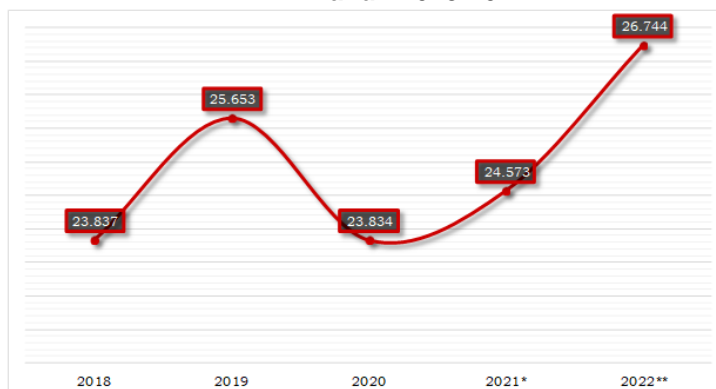
Selanjutnya Nilai PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp.53.771.057.500.000,00 sedangkan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 sebesar Rp.35.414.759.350.000,00. Lapangan usaha yang menyumbang kontribusi paling besar berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 36,01% dari total PDRB, yaitu sebesar Rp.11.752.524.770.000,00 (PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dan Rp.19.362.167.560.000,00 (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku).

Nilai PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari Rp.42.973.395.360.000,00 pada tahun 2018 menjadi Rp.53.771.057.500.000,00 pada tahun 2022, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pula dari Rp.31.060.106.120.000,00 pada tahun 2018, menjadi Rp.35.414.759.350.000,00 pada tahun 2022.

E. Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan data BPS, PDRB per kapita Kabupaten Brebes tahun 2018-2022 fluktuatif dengan kecenderungan mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar Rp.23.837.000,-, pada tahun 2019 sebesar Rp.25.653.000,-, menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.23.834.000,-, meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.24.573.000,- dan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.26.744.000,-. Peningkatan PDRB per kapita menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes semakin meningkat.

Grafik 7
PDRB per Kapita Kabupaten Brebes (Ribu Rupiah)
Tahun 2018-2022



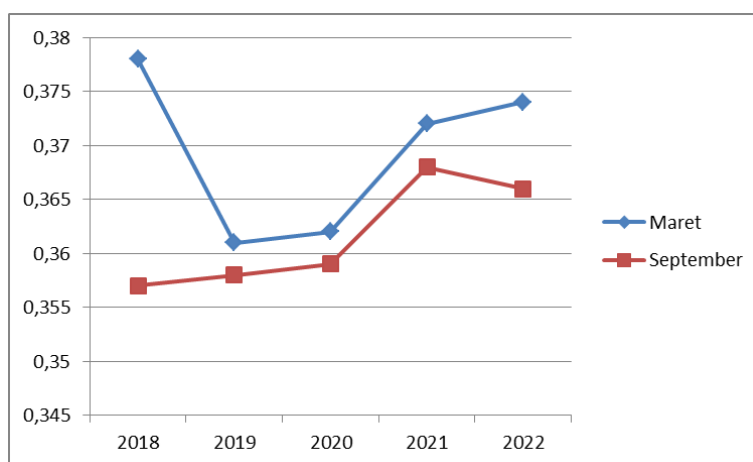
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2022

F. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau konsumsi di antara individu atau rumah tangga. Skala ukuran indeks Gini adalah 0-1. Semakin mendekati angka 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, maka ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2022 sebesar 0,374 mengalami perubahan sebesar 0,538 dari bulan Maret tahun 2021 sebesar 0,372 dan di bulan September 2022 sebesar 0,366 mengalami perubahan sebesar -0,543 dari tahun 2021 sebesar 0,368. Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 8
Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2022

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Tabel 1
Capaian Kinerja IKK Outcome Urusan Wajib Pelayanan Dasar

NO	URUSAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	109,6%
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	90,73%
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	92,58%
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	9,09%
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,09%
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi.	86,67%
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	86,65 %
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	99,71%

NO	URUSAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
			persalinan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,02%
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,32%
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,09%
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,5%
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61,72%
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40,35%
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85%
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	64,65%
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	61,9%
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,12%
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	-
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	-
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	77,75%
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100%
		5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,08%
		6	Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota	100%
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	69,21%
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	97,38%
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100%
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	24,68 %
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,9%
		5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	97,23%

NO	URUSAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71%
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,33 Menit
6	Sosial	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN ANGGARAN 2019)

a. Hasil EPPD Tahun Anggaran 2021

Hasil evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Provinsi dan Tim Nasional Kemendagri untuk LPPD Tahun Anggaran 2021 (EPPD Tahun 2022), hasilnya Kabupaten Brebes belum keluar hasil EPPD di tahun tersebut. Demikian pula Hasil evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 dan Tahun 2020 juga belum keluar, sedangkan untuk Hasil evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 oleh Tim Inspektorat Provinsi dan Tim Nasional Kemendagri untuk LPPD Tahun Anggaran 2018 (EPPD Tahun 2019) hasilnya Kabupaten Brebes pada dengan skor 3,2264 dengan status kinerja Sangat Tinggi dalam Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri kepada Pemerintah Kabupaten Brebes atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2020.

b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat (Opini atas Laporan Keuangan) : “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, untuk jelasnya dilampirkan hasil pemeriksaan dimaksud yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 55A/LH/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 55B/LHP/XVIII.SM/05/2022 masing-masing bertanggal 18 Mei 2022.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.994.091.244.684,06 (96.31%) dari target anggaran sebesar Rp.3.108.650.039.024 Secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes T.A 2022

URAIAN	TAHUN 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN DAERAH	3.108.650.039.024	2.994.091.244.684,06	96,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	428.736.313.711	419.385.481.540,06	97,82
Pajak Daerah	146.325.000.000	150.333.758.117,00	102,74
Retribusi Daerah	35.804.020.000	19.577.537.040,00	54,68
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.176.082.128	10.978.000.615,00	98,23
Lain-lain PAD yang Sah	235.431.211.583	238.496.185.768,06	101,30
PENDAPATAN TRANSFER	2.639.363.725.313	2.561.493.844.539,00	97,05
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.368.899.626.313	2.308.611.906.031,00	97,46
Pendapatan Transfer Antar Daerah	270.464.099.000	252.881.938.508,00	93,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.550.000.000	13.211.918.605,00	32,58
Pendapatan Hibah	40.550.000.000	13.211.918.605,00	32,58

Sumber data : LRA BPKAD Kabupaten Brebes 2022 (unaudited).

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Pada pelaksanaan urusan pemerintahan realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.091.065.409.503,00 atau 94,21 % dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.3.280.909.475.579,00 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan seperti tabel berikut ini :

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TAHUN 2022		(%)
	ANGGARAN	REALISASI	

URAIAN	TAHUN 2022		(%)
	ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA DAERAH	3.280.909.475.579	3.091.065.409.503	94,21
BELANJA OPERASI	2.108.738.303.662	1.952.403.638.601	92,59
Belanja Pegawai	1.123.994.907.904	1.018.714.340.491	90,63
Belanja Barang dan Jasa	851.840.329.758	803.319.435.625	94,30
Belanja Hibah	125.452.516.000	123.313.637.485	98,30
Belanja Bantuan Sosial	7.450.550.000	7.056.225.000	94,71
BELANJA MODAL	505.796.237.092	480.524.776.854	95,00
Belanja Modal Tanah		0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.686.241.510	114.012.955.313	87,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.122.351.181	166.066.285.008	97,62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	187.740.352.087	183.852.539.769	97,93
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.587.830.581	12.487.544.281	99,20
Belanja Modal Aset Lainnya	5.659.461.733	4105452483	72,54
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.900.000.000	3.717.196.960	63,00
Belanja Tidak Terduga	5.900.000.000	3.717.196.960	63,00
BELANJA TRANSFER	660.474.934.825	654.419.797.088	99,08
Belanja Bagi Hasil	19.585.341.825	15.302.204.088	78,13
Belanja Bantuan Keuangan	640.889.593.000	639.117.593.000	99,72
SURPLUS/DEFISIT	-172.259.436.555	-96.974.164.818,940	56,30

Sumber data : LRA BPKAD Kabupaten Brebes 2022 (un audited).

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah berkaitan dengan Target dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022. Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp.185.759.436.555,00 dengan realisasi sebesar Rp. 185.753.831.555,29 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.185.749.436.555,29 dan Penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp4.395.000,00.

5. INOVASI DAERAH

Inovasi merupakan serangkaian akumulasi gagasan baru yang diimplementasikan menjadi sebuah produk, proses maupun pelayanan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di sektor publik tidak terjadi pada satu waktu saja, melainkan melalui serangkaian proses mulai dari pembahasan ide hingga pada proses implementasi.

Di tiga bulan pertama masa jabatan sebagai Penjabat Bupati Brebes, terdapat satu rancangan inovasi tentang pengembangan **aplikasi monitoring dan evaluasi kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting**. Penyusunan inovasi tersebut berangkat dari persoalan belum adanya sarana untuk memantau progress penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting dalam satu aplikasi. Melalui aplikasi yang sedang dikembangkan, diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim dan juga percepatan penurunan stunting.

Saat ini pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi kemiskinan sudah pada tahap uji coba/ demo aplikasi. Tahapan uji coba aplikasi ini dilakukan pada tanggal 2 Maret 2023. Penciptaan dan pengembangan inovasi ini diharapkan mampu mempertahankan predikat Kabupaten Brebes sebagai daerah inovatif.

Pengembangan inovasi melalui aplikasi monitoring dan evaluasi penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting juga menguatkan inovasi daerah yang sudah diterapkan oleh perangkat daerah lain di tahun sebelumnya. Penciptaan dan pengembangan inovasi ini diharapkan mampu mempertahankan predikat Kabupaten Brebes sebagai daerah inovatif.

Di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Brebes mendapat predikat sebagai daerah inovatif oleh Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 adalah 47,94. Capaian tersebut lebih baik dari capaian tahun 2021, dimana pada tahun tersebut Kabupaten Brebes hanya memperoleh nilai 16,37 dengan predikat Daerah Kurang Inovatif.

Tabel 4
Daftar Inovasi yang Dinilai
Dalam Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

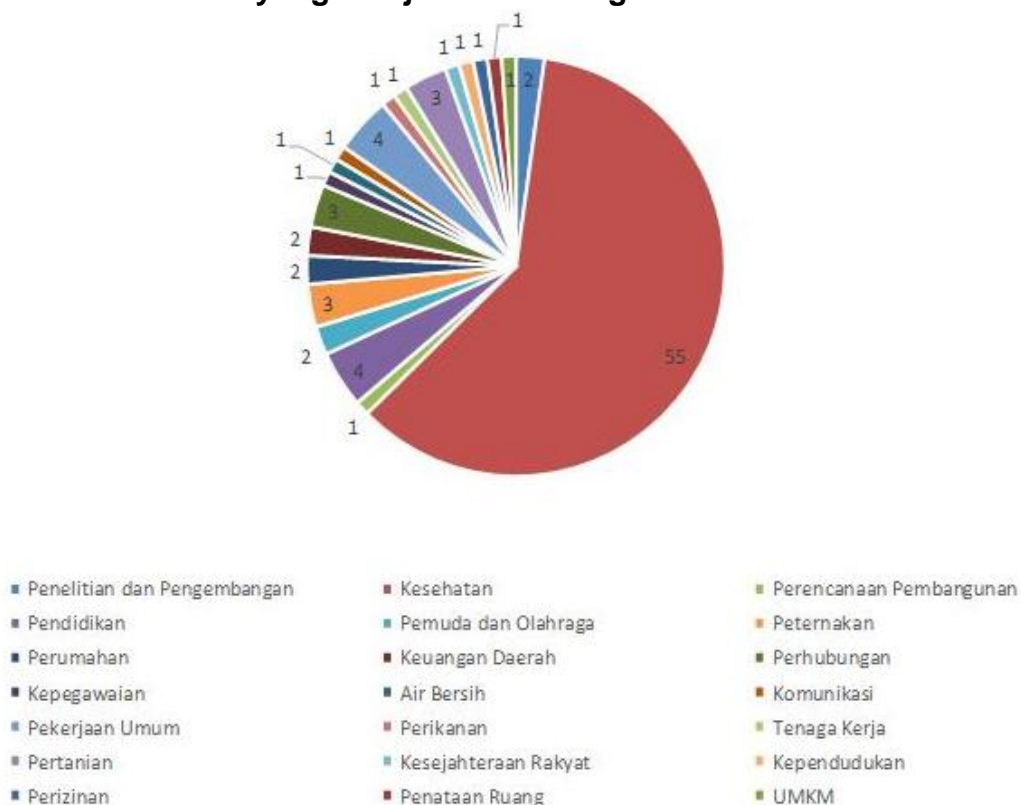
No	Nama Inovasi	OPD Pengampu
1	Sanak Sekadang (Sehat Ternak Sehat Kandang)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Klinik Penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
3	Aduan Layanan Masyarakat Kabupaten Brebes "Sambat Maring Bupati" (SAMBU)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
4	PeDeKaTe ABK (Peduli, Deteksi, dan Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus)	Puskesmas Bumiayu
5	Sistem Whatsapp Gateway Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes	PDAM Tirta Baribis
6	Si Kepang Papat (Sistem Kenaikan Pangkat Pasti Cepat)	BKPSDMD
7	Kelas Khusus Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
8	SIKERBO SPRINT (Sistem pengujian Kendaraan Bermotor Online – Sistem Pembayaran Retribusi Non Tunai)	Dinas Perhubungan
9	Ndoro Koyo Desa Rodjo Koyo Pembibitan Doma Sakub di kabupaten brebes	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	AVERROES: Layanan Perizinan KKN dan Kegiatan penelitian Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
11	Sistem Informasi Pelaporan Keuangan dan Informasi BPKAD Brebes (Si Pikir Beres)	Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah
12	Pengelolaan Rumah Swadaya Melalui Pendekatan C – G (Community – Government) Mengurangi Angka Backlog di Kabupaten Brebes	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Sistem Informasi Kebutuhan Gizi (SIKUBIZ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes	RSUD Brebes
14	Sistem Informasi Masyarakat Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	Gerakan Kembali Bersekolah – Anak Tidak Sekolah (GKB-ATS)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
16	Pengembalian Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
17	PLAKAT (Penyelamat Masyarakat)	Puskesmas Tonjong
18	SIKOBRA (Sistem Informasi Tata Kelola Paskibra)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Nama Inovasi	OPD Pengampu
19	SIMPORA (Sisten Informasi Pendataan Olahraga)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
20	SiMas BOS (Sistem Informasi Aset BOS)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sumber: diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2022)

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, di akhir tahun 2022 yang lalu. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Keputusan Bupati Nomor 050/3771 Tahun 2022 telah menetapkan 91 Inovasi Daerah di Kabupaten Brebes. Inovasi di sektor kesehatan menjadi yang terbanyak dengan 55 inovasi, yang tersebar di berbagai Puskesmas dan RSUD. Selain itu, terdapat masing-masing 4 inovasi di sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Di sektor peternakan, perhubungan, dan pertanian terdapat masing-masing 3 inovasi daerah. Di bidang Penelitian dan Pengembangan, Pemuda dan Olahraga, Perumahan, dan Keuangan Daerah masing-masing terdapat 2 inovasi. Sementara itu, di bidang perencanaan pembangunan, kepegawaian, air bersih, komunikasi, perikanan, tenaga kerja, Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, Perizinan, Penataan Ruang, dan UMKM terdapat masing-masing 1 inovasi. Sebaran inovasi di berbagai urusan pemerintahan dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :

Diagram 1
Sebaran Inovasi Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah



Sumber: diolah dari Peraturan Bupati Brebes No, 52 Tahun 2022

Di tahun 2023, sebagai langkah awal dalam mendukung kemajuan UMKM dan produk Kopi lokal asal Brebes, Penjabat Bupati Brebes mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 0275/001.1 Tahun 2023 tentang Himbauan Penggunaan, Bela Beli Produk UMKM dan Kopi Brebes di Kabupaten Brebes. Upaya ini merupakan inisiasi awal dari tahapan

inovasi dalam rangka mendukung pengembangan UMKM dan pengembangan Kopi Lokal Brebes. Di tahap inisiasi inovasi, terdapat beberapa tahapan dalam mendukung pengembangan UMKM dan Kopi lokal Brebes, yaitu:

- a. Penyajian makanan dan minuman dari produk UMKM Kabupaten Brebes di setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan instansi/perangkat daerah,;
- b. Pemberian cinderamata atau oleh-oleh berupa produk UMKM Kabupaten Brebes untuk tamu dari luar kota;
- c. Penggunaan Batik Brebesan atau Batik Mangrove sebagai pakaian kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- d. Penyajian produk minuman Kopi Brebes sebagai variasi menu minuman kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- e. Penyediaan tempat khusus "Lapakemane" untuk display produk UMKM yang berada di pintu barat Pendopo Kabupaten Brebes;
- f. Himbauan kepada OPD dan Masyarakat Brebes untuk mempromosikan produk UMKM Brebes melalui beberapa platform media sosial online seperti Facebook, Instagram, dan Tik Tok "LAPAKEMANE" sebagai media promosi kepada masyarakat luas.

PENUTUP

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kabupaten Brebes di berbagai sektor, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi guna terwujudnya Kabupaten Brebes yang mandiri produktif, sejahtera dan berkeadilan.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Brebes, 28 Maret 2023

PENJABAT BUPATI BREBES



URIP SIHABUDIN, SH, MH